



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Bayu Chandra Adji Adityo¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Permasalahan persampahan di Kabupaten Bandung Barat masih menjadi isu krusial yang ditandai dengan tingginya volume sampah, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat”** dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho, yang meliputi dimensi kualitas kebijakan, kapasitas birokrasi, koordinasi antaraktor, serta dukungan politik dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, aparat desa, petugas kebersihan, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah secara normatif telah cukup jelas, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antaraktor, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya efektif dan memerlukan penguatan pada seluruh dimensi implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah

Abstract

Solid waste management in West Bandung Regency remains a critical issue, as indicated by the high volume of waste, limited management facilities and infrastructure, and low levels of community participation. These conditions suggest that the implementation of local government policies on waste management has not been fully optimal. This study aims to analyze the “implementation of local government policies on solid waste management in West Bandung Regency” using the public policy implementation theory proposed by Riant Nugroho, which includes the dimensions of policy quality, bureaucratic capacity, inter-actor coordination, as well as political support and community participation. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and

documentation involving informants from the Environmental Agency of West Bandung Regency, village officials, sanitation workers, and community members. The results indicate that waste management policies are normatively clear; however, their implementation in practice remains inadequate. Limitations in human resources, budget allocation, and facilities and infrastructure, weak inter-actor coordination, and low community participation are the main obstacles. In conclusion, the implementation of solid waste management policies in West Bandung Regency has not been fully effective and requires strengthening across all dimensions of policy implementation.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Local Government*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Peningkatan jumlah penduduk, perluasan kawasan permukiman, serta pertumbuhan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah terus meningkat dan menimbulkan tekanan terhadap kapasitas pengelolaan lingkungan. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya memiliki kebijakan yang jelas secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara efektif dan berkelanjutan guna menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat (Bintoro, 2017).

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang hingga saat ini masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah. Wilayah administratif yang luas dengan enam belas kecamatan menghasilkan timbulan sampah yang tinggi setiap harinya, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana, prasarana, dan sistem pengelolaan yang memadai. Keterbatasan armada pengangkut, fasilitas pengolahan, serta ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti dengan jumlah ritase yang terbatas menyebabkan sebagian besar sampah tidak tertangani secara optimal dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini menekankan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sekadar pengangkutan dan pembuangan menjadi pengurangan sampah dari sumber melalui penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R), serta pelibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Dye (2014), kebijakan publik tidak hanya dilihat dari apa yang dirumuskan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan kapasitas birokrasi, lemahnya koordinasi antaraktor pelaksana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta dukungan politik yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan kebijakan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nugroho (2018) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan, kapasitas organisasi pelaksana, koordinasi antaraktor, serta dukungan politik dan partisipasi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas kebijakan serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan tata kelola persampahan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat. Objek penelitian adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Subjek penelitian meliputi aparatur Dinas Lingkungan Hidup, aparat pemerintah desa, petugas kebersihan, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitan dan pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan Riant Nugroho yang meliputi dimensi kualitas kebijakan, kapasitas birokrasi, koordinasi antaraktor, serta dukungan politik dan partisipasi masyarakat.

PEMBAHASAN

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan persampahan yang semakin kompleks. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai dinamika di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, perbedaan tingkat kesiapan antarwilayah, hingga rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini implementasi kebijakan pengelolaan sampah dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Riant Nugroho, yang mencakup empat dimensi utama, yaitu kualitas kebijakan, kapasitas birokrasi, koordinasi antaraktor, serta dukungan politik dan partisipasi masyarakat.

a) Kualitas Kebijakan Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah memiliki kualitas kebijakan yang cukup baik dari sisi kejelasan normatif. Perda ini secara jelas mengatur hak masyarakat atas pelayanan persampahan, kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat, serta ketentuan sanksi administratif bagi pelanggaran. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum dan pembagian peran yang tegas, serta menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam pengelolaan sampah. Dari aspek perumusan, kebijakan ini telah memenuhi unsur kejelasan tujuan dan konsistensi substansi sebagaimana disyaratkan dalam dimensi kualitas kebijakan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kejelasan normatif kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan persampahan belum dirasakan secara merata akibat keterbatasan sarana dan prasarana, seperti TPS dan sistem pengangkutan. Kewajiban pemilahan sampah di sumber yang telah diatur secara jelas juga belum berjalan optimal karena **belum didukung oleh fasilitas pendukung dan sistem pengangkutan yang terpisah**. Selain itu, meskipun sanksi administratif telah diatur secara tegas, penegakannya masih lemah, yang tercermin dari masih maraknya pembuangan sampah sembarangan dan keberadaan TPS liar.

Temuan hasil wawancara dan observasi juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap isi Perda masih terbatas akibat **minimnya sosialisasi kebijakan**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang jelas secara hukum belum sepenuhnya komunikatif dan mudah dipahami oleh sasaran kebijakan. Dalam perspektif teori Riant Nugroho, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan substansi, tetapi juga oleh tingkat implementabilitas dan keterpahaman kebijakan. Dengan demikian, kualitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat tergolong kuat pada level normatif, tetapi masih lemah pada aspek implementasi operasional, sehingga memerlukan penguatan dukungan fasilitas, sosialisasi, serta konsistensi penegakan kebijakan.

b) Kapasitas Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Kapasitas birokrasi merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi tidak bersifat merata pada setiap level pemerintahan. Pada tingkat Dinas Lingkungan Hidup, kapasitas birokrasi relatif telah memadai, baik dari sisi kompetensi aparatur maupun pemahaman terhadap regulasi pengelolaan sampah. Aparatur di tingkat dinas dinilai mampu menjalankan fungsi perencanaan,

pengendalian, dan pengawasan kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020.

Namun demikian, kapasitas birokrasi mengalami penurunan yang signifikan pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaksana lapangan. **Keterbatasan jumlah personel** menyebabkan beban kerja petugas menjadi tidak seimbang dan berdampak pada kurang optimalnya pengumpulan, pengangkutan, serta pengawasan pengelolaan sampah di wilayah pelayanan. Kondisi ini diperparah oleh **keterbatasan infrastruktur pendukung**, terutama kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang telah mendekati daya tampung maksimal, sehingga sering menimbulkan penumpukan sampah di TPS dan lingkungan permukiman.

Pada tingkat pemerintahan desa, kapasitas birokrasi masih bersifat terbatas dan cenderung berfokus pada aspek teknis pengumpulan dan pengangkutan sampah. Desa Laksanamekar, misalnya, belum memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang aktif dan masih sangat bergantung pada fasilitas di luar wilayah desa. Selain itu, tidak berlanjutnya program pemberdayaan masyarakat seperti Ecovillage menunjukkan lemahnya kapasitas birokrasi desa dalam menjaga keberlanjutan program lingkungan dan mendorong pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan di sumber.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Riant Nugroho, temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat masih bersifat parsial. Meskipun relatif kuat pada level perumus kebijakan, kapasitas tersebut melemah pada level pelaksana teknis dan desa akibat **keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, serta fungsi manajerial dan pemberdayaan**. Ketimpangan kapasitas antarlevel birokrasi inilah yang menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan. Koordinasi Antaraktor dalam Pengelolaan Sampah

c) Koordinasi Antaraktor dalam Pengelolaan Sampah

Koordinasi antaraktor dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat secara umum telah berjalan secara fungsional dan berjenjang, mulai dari masyarakat, petugas kebersihan di tingkat RW, pemerintah desa, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Pola koordinasi tersebut tercermin dalam alur pengelolaan sampah yang dimulai dari pengumpulan sampah rumah tangga oleh petugas kebersihan, penampungan sementara di TPS, hingga pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti oleh UPT. Pembagian peran antaraktor telah dipahami secara praktis di tingkat lapangan dan mendukung kelangsungan pengelolaan sampah sehari-hari.

Namun demikian, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa koordinasi yang terbangun masih berorientasi pada pola konvensional angkut-buang. Koordinasi antaraktor terutama difokuskan pada aspek teknis pengumpulan dan pengangkutan sampah, sementara **aspek pemilahan, pengolahan, dan pengurangan sampah di sumber belum menjadi bagian dari pola koordinasi yang terstruktur**. Koordinasi yang berlangsung juga cenderung bersifat informal dan berbasis kebiasaan, tanpa didukung oleh mekanisme baku seperti prosedur operasional standar, sistem informasi terintegrasi, atau forum koordinasi rutin lintas aktor.

Keterbatasan koordinasi ini terlihat ketika terjadi keterlambatan pengangkutan oleh UPT, di mana informasi tidak selalu tersampaikan secara cepat kepada petugas kebersihan dan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan sampah di titik pengumpulan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Riant Nugroho, kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor belum sepenuhnya sinkron dan integratif. Meskipun telah berjalan pada level operasional dasar, koordinasi belum mampu mendorong pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antaraktor diperlukan, tidak hanya untuk menjamin kelancaran pengangkutan sampah, tetapi juga untuk

mengintegrasikan upaya pengurangan dan pengolahan sampah di sumber sesuai dengan amanat kebijakan pengelolaan sampah daerah.

d) Dukungan Politik dan Partisipasi Masyarakat

Dukungan politik dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat secara umum telah tersedia baik di tingkat kabupaten maupun desa, meskipun masih belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Di tingkat kabupaten, dukungan politik terutama berasal dari DPRD Kabupaten Bandung Barat yang secara umum memberikan persetujuan dan legitimasi terhadap kebijakan serta program pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dukungan ini memperkuat posisi Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana utama kebijakan dan menjamin keberlangsungan program secara institusional. Namun demikian, dukungan politik di tingkat kabupaten cenderung bersifat normatif dan institusional, serta belum sepenuhnya tertransformasi menjadi dorongan politik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti melalui sosialisasi massif, kampanye publik, atau simbol-simbol komitmen politik yang kuat di tingkat lapangan.

Di tingkat desa, dukungan politik menunjukkan karakter yang lebih praktis dan operasional. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan koordinator antara masyarakat, RT/RW, petugas kebersihan, dan UPT, serta memberikan legitimasi terhadap sistem pengelolaan sampah berbasis swadaya masyarakat. Dukungan ini terlihat dari keterlibatan aparat desa dalam pengorganisasian petugas kebersihan, pengelolaan iuran sampah, serta komunikasi dengan pihak kabupaten. Namun, dukungan politik desa tersebut masih bersifat informal dan belum terlembagakan secara kuat dalam bentuk kebijakan desa yang tertulis, alokasi anggaran khusus, atau kelembagaan yang berkelanjutan. Program lingkungan berbasis masyarakat yang pernah ada, seperti Ecovillage, juga belum mampu dipertahankan secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa dukungan politik desa masih bersifat temporer dan sangat bergantung pada inisiatif personal aparat desa.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Riant Nugroho, kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat telah ada, tetapi belum sepenuhnya memenuhi dimensi keberlanjutan, konsistensi penganggaran, dan penguatan kelembagaan. Akibatnya, implementasi kebijakan masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau tingkat masyarakat secara lebih luas dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di Desa Laksanamekar RW 06, masih menunjukkan **tingkat keterlibatan yang belum optimal**. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat sumber, terutama dalam kegiatan pemilahan dan pengurangan sampah rumah tangga, masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah dalam kondisi tercampur antara sampah organik dan anorganik, tanpa pemilahan sejak dari rumah tangga. Pemilahan sampah justru lebih banyak dilakukan oleh petugas kebersihan di tingkat lingkungan, sehingga tanggung jawab pengelolaan sampah masih terpusat pada aktor pelaksana, bukan pada masyarakat sebagai penghasil sampah.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sarana pendukung, seperti tidak tersedianya fasilitas pemilahan sampah, serta minimnya sosialisasi dan edukasi kebijakan kepada masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan kolektif, seperti kerja bakti atau program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, juga masih terbatas dan hanya melibatkan sebagian kecil warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan individual, serta belum berkembang menjadi partisipasi aktif dan kolektif.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa masyarakat telah menunjukkan bentuk partisipasi dalam aspek

dukungan operasional pengelolaan sampah. Partisipasi tersebut tercermin dari kesediaan masyarakat membayar iuran sampah bulanan yang dikelola oleh RT dan RW untuk membiayai operasional petugas kebersihan. Bentuk partisipasi ini memungkinkan sistem pengumpulan sampah tetap berjalan secara rutin di tingkat lingkungan, meskipun belum sepenuhnya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho, partisipasi masyarakat yang terjadi masih didominasi oleh partisipasi administratif dan operasional, bukan partisipasi substantif. Masyarakat lebih berperan sebagai penerima layanan dan pendukung pembiayaan, sementara keterlibatan aktif dalam pengurangan dan pengelolaan sampah di tingkat sumber masih lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat sebagai aktor utama perubahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan, penyediaan sarana pendukung, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat agar tujuan kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan secara efektif. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan cukup baik, berbagai kendala pada dimensi kapasitas birokrasi, koordinasi antaraktor, serta partisipasi masyarakat menyebabkan tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada keterpaduan seluruh dimensi implementasi. Penguatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif agar kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan secara optimal meskipun telah didukung oleh regulasi yang relatif jelas dan komprehensif. Kebijakan tersebut secara normatif telah mengatur arah dan tujuan pengelolaan sampah, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala pada tingkat implementasi. Keterbatasan kapasitas birokrasi, terutama dari sisi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, koordinasi antaraktor telah berjalan pada aspek operasional pengangkutan dan pembuangan sampah, tetapi belum berkembang menuju pengelolaan yang lebih berkelanjutan melalui pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber. Dukungan politik terhadap kebijakan pengelolaan sampah telah ada, namun belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang aktif dan merata. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat memerlukan penguatan secara menyeluruh pada setiap dimensi implementasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.
- Purwanto, E. A., Sulistyastuti, D. R., & Pramusinto, A. (2019). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 123–137.
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, S. (2019). Implementasi kebijakan publik dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 45–58.
- Yuliani, T., & Prasetyo, B. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis kebijakan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 89–101.